

**PELAKSANAAN MUDHARABAH PADA BAITTUL TAMWIL
WAL MAL (BTM) MUHAMADIYAH RIAU PEKANBARU
MENURUT FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Program Studi Muamalah



Oleh :

ARI SETIYAWAN
NIM. 10622003751

PROGAM S1

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Mudharabah Pada Baittul Tamwil Wal Mal (BTM) Muhamadiyah Riau Pekanbaru Menurut Fiqih Muamalah**”

Penelitian ini dilatar belakangi masalah oleh Pembagian keuntungan antara pengelola dan BTM Muhamadiyah Riau yang dilakukan setiap hari, tiga hari sekali, satu minggu sekali atau sebulan sekali tergantung lagi kesepakatan diawal juga, setelah disisihkan modal awal dan sisanya menjadi keuntungan yang akan dibagi kedua belah pihak. Jadi disini atau dikonsep syariah itu pengelola tidak dianjurkan untuk mencicil mengembalikan modalnya, namun di BTM Muhamadiyah Riau yang mana pengelola diwajibkan mencicil modal yang dipinjamkan, bahkan keterlambatan cicilan akan dikenai denda atau bunga. Hal ini jelas tidak sejalan dengan konsep Syariah.

Berangkat dari hal di atas yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau Pekanbaru dan bagaimana tinjauan Fiqih muamalah terhadap pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau tersebut.

Penelitian ini berbentuk study lapangan yang dilaksanakan secara langsung pada BTM Muhammadiyah Riau yang terletak di Jl. Adi Sucipto Komplek Pasar Arengka Pekanbaru Riau. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Setelah penulis melakukan penelitian maka diketahui bahwa praktek pelaksanaan pembiayaan yang ada di BTM Muhammadiyah Riau masih mempunyai

atau mengandung unsur unsur riba sesuai dengan bukti atau fakta yang ada di lapangan yakni adanya denda sebesar 5 % atas keterlambatan pembayaran.

KATA PENGANTAR



Segala Puji Syukur hanya kepada Illahi Robbi, yang mana dengan Rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Mudharabah pada BMT Muhamadiayah Riau Menurut Fiqih Muamamalah”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, *“Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad Wa’ Ala Muhammad”* yang telah membawa perubahan besar pada peradaban manusia saat ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini terkadang menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah Swt dan do’a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas juga atas dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Ihwan Suryawan (Alm) dan Ibunda Tumanah yang telah mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan penulis dan memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa mendo’akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap Agama dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan semuanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir MA dan staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau Pekanbaru.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta segala jajarannya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak (Alm). Drs. M. Nur Asmuni, M.Ag, selaku Mantan Ketua Jurusan Muamalah, kepada bapak Kamiruddin, M. Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc, MA, selaku pembimbing yang telah dengan ikhlasnya meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau sehari-hari.
6. Kepala perpustakaan UIN Suska Riau beserta segenap stafnya, serta kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau beserta segenap stafnya, yang telah membantu penulis dalam menentukan referensi atau buku yang diperlukan.

Akhirnya Kepada Allah Swt jualah penulis mohon do'a serta harapan, semoga semua yang telah diberikan baik dorongan, bantuan, partisipasi dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah Swt dengan pahala yang setimpal disisi-Nya. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfa'at bagi kita semua.

Pekanbaru, 23 Mei 2013

ARI SETIYAWAN

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Metode Penelitan	11
E. Sistematika Penulisan	13
Bab II Gambaran Umum Tentang Baitul Tamwil Wal Mall Muhammadiyah	
Riau Pekanbaru	
A. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Muhammadiyah Riau.....	15
B. Prinsip dan Tujuan Lembaga	17
C. Struktur Organisasi dan Keanggotaan	18
D. Strategi Pemasaran dan Pengembangan Lembaga.....	21
E. Produk yang Ada di BTM Muhammadiyah Riau	24
F. Perbedaan BTM dan BMT Muhammadiyah Riau	26
BAB III Gambaran Umum Tentang Konsep Mudharabah Dan Riba	
A. Pengertian Mudharabah	28
B. Fungsi Mudharabah	31
C. Landasan Hukum Mudharabah	32
D. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	34
E. Syarat-Syarat Syah Mudharabah.....	36
F. Jenis-Jenis Mudharabah	38
G. Hal-Hal yang Berhubungan Dengan Mudharabah.....	39
H. Pertentangan Antara Pemilik dan Pengusaha.....	40
I. Resiko Kerugian Dalam Akad Mudharabah	43
J. Riba Dalam Islam	44
BAB IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil (Mudharabah)	
Pada Baitul Tamwil Wal Mal Muhammadiyah	

A. Tata Cara Pelaksanaan Bagi Hasil(Mudharabah) Pada Baitul Tamwil Wal Mal Muhammadiyah Riau.....	54
B. Tinjauan Atau Analisa Fikih Muamalah/Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama atau Bagi Hasil Pada Baitul Tamwil Wal Mal Muhammadiyah Riau	67
C. Tinjauan Atau Analisa Fikih Muamalah / Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Baitul Tamwil Wal Mal Muhammadiyah Riau	68
 BAB V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu al-Qur'an. Di antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah muamalah. Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan usaha perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan tata usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal.

Di dalam masalah di atas (bagi hasil) Islam memberi ketentuan hanya secara garis besarnya saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisian tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Adapun bagi hasil menurut syari'ah Islam, salah satunya adalah *mudharabah*.

Mudharabah ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.¹

Ajaran Islam mencakup dua dimensi pokok, yakni dimensi vertikal (*hablum minallah*) dan dimensi horizontal (*hablum minannas*). Keduanya mempunyai arti ibadah, yakni ketaatan seseorang hamba kepada Allah. Aktivitas perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang menurut fiqh Islam dikelompokkan ke dalam masalah *mu'amalah*, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²

Salah satu yang termasuk dalam fiqh mu'amalah adalah *mudharabah*. *mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* diambil dari kata yang berarti (*potongan*), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.³ Sedangkan menurut istilah *mudharabah* atau *qiradh* adalah aqad antara

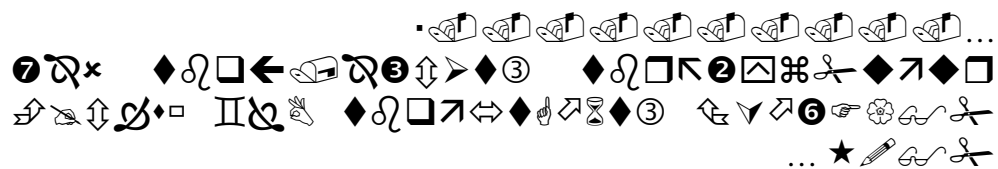
¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke 1, h. 135.

²Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet ke 7, h. 7-8.

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet ke 2, h. 223.

pemilik modal (harta) dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁴

Mudharabah juga bisa diartikan dengan suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/ pengelola, untuk di niagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal.⁵ Adapun dasar hukum *mudharabah* adalah tercantum dalam al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20 :



Artinya : “.....dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”.⁶

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shohib al mal* (investor) memanfaatkan keahlian *mudhorib* (pengelola) dan *mudhorib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah swt tidak

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet ke 1, h. 138.

⁵*Ibid*, h. 135.

⁶Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2009), cet ke 1, h. 576.

mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan

Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan dengan dikelola dan diperniagakan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga, juga tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu *mudharabah* ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak. Sementara objek transaksi disyaratkan harus berupa alat tukar uang. Dibolehkan menanamkan modal dengan hutang yang berada di tangan orang yang mampu membayarnya dan tentu saja mengakui bahwa dirinya memang berhutang, menurut pendapat yang benar dari kalangan ulama. Dibolehkan juga menanamkan modal dengan menggunakan uang titipan, kecuali kalau uang titipan tersebut sudah dibelanjakan, sehingga hukumnya menjadi modal berupa hutang. Investor juga bisa menambahkan dana segar pada modal yang ada, namun harus ditinjau sebagai modal terpisah dengan keuntungan dan kerugian tersendiri. Boleh juga menarik sebagian modal, yang berarti transaksi terhadap modal yang sudah ditarik menjadi batal. Namun hak investor terhadap modal yang tersisa tetap ada.

Pengelola modal tidak dibolehkan mengembangkan modal dengan menjual barang-barang haram, para ulama bersepakat dalam hal ini. Boleh

juga melakukan usaha investasi dengan kriteria tertentu, selama kriteria tersebut berguna dan dikembalikan kepada kebiasaan yang ada.

Bahkan pengelola bisa melakukan usaha investasi lain dengan pengelola lain menggunakan modal yang sama, kalau ia diizinkan oleh pemilik modal atau diberikan hak penuh untuk mengelola modalnya sesuka hati. Pengelola juga bisa menggunakan modal tersebut untuk mengajak kerja sama pengelola lain. Namun pengelola tidak dibolehkan untuk berhutang dalam melakukan usaha.

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Investor memanfaatkan keahlian *mudhorib* (pengelola) dan *mudhorib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Begitu indahny Islam dalam mengatur hal kehidupan dalam bermasyarakat, ketika seseorang mempunyai harta yang berlebih tapi tidak sempat mengusahakannya, maka Islam mengatur dengan cara bermudharabah, hal ini pun akan menciptakan hal-hal yang positif di lingkungan masyarakat itu sendiri, dalam hal ini konsep *mudharabah* yang paling cocok.

Melihat kondisi masyarakat yang seperti inilah diperlukan suatu kerja sama antara pemilik modal dengan pihak yang tidak memiliki atau kekurangan modal. Yang mana hal ini ditangkap oleh BTM Muhamadiyah Riau, maka salah satu produk yang ada di BTM Muhamadiyah Riau adalah *mudharabah*.

Salah satu lembaga keuangan dalam ekonomi Islam adalah Baituttamwil. (BTM), yang peranannya dalam sirkulasi uang yang menjadikan uang yang ada tidak mengendap akan tetapi berputar dengan meningkatkan seseorang untuk menggunakan uangnya guna memproduksi dan berinvestasi. Sirkulasi menurut para ekonom adalah kumpulan perjanjian dan proses yang diporosnya manusia menjalankan aktivitasnya. Atau sirkulasi adalah pendayagunaan barang dan jasa lewat kegiatan jual beli dan simpan pinjam melalui agen, koperasi dan lain-lain, baik sebagai sarana perdagangan ataupun tukar menukar barang.⁷ BTM pun berperan menurunkan tingkat kemiskinan, dalam hal ini tercemin dengan adanya pergerakan BTM dalam bidang hal rill, yang berarti BTM mempunyai tiga jenis aktivitas yaitu jasa keuangan, sosial atau pengelolaan zakat infaq sadaqah serta sektor rill.

Masyarakat masih beranggapan bahwa BTM dengan BMT adalah sama, tapi ternyata tidak, dalam hal ini penulis akan memaparkan perbedaan antara BTM Muhamadiyah Riau dengan BMT Muhamadiyah Riau. Dan perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Adapun Perbedaan antara BTM Muhamadiyah Riau dengan BMT Muhamadiyah Riau terlihat pada tabel dibawah ini,

⁷Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), cet ke 8, h. 171.

Tabel. I
Perbedaan BMT Muhamadiyah Riau Dengan BTM Muhamadiyah Riau

	BMT Muhamadiyah	BTM Muhamadiyah
Nama resmi	<i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Muhamadiyah	<i>Baitut Tamwil</i> Muhammadiyah (BTM) Muhamadiyah
Cakupan identitas	Lembaga sosial (<i>Baitul Maal</i>) dan lembaga keuangan (<i>Baitut Tamwil</i>)	Lembaga keuangan perbankan (<i>Baitut Tamwil</i>) professional murni
Anggota	Para (mantan) aktivis Pemuda Muhammadiyah dan terbuka untuk umum orang Islam	Warga, AUM dan eselon resmi Muhammadiyah.
Afiliasi organisasi	Mandiri	Mandiri
Pedoman akhlak karyawan	Ajaran Islam secara umum	Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM)
Pemilik asset	Lembaga BMT Muhamadiyah	PP Muhammadiyah
Tata-kelola	Sistem mandiri	Sistem standar versi BTM

BTM Muhammadiyah Riau yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah sebagai unit usaha yang bergerak semacam Bank Syariah Mini dengan mengelola dana simpanan dan pembiayaan kepada usaha kecil dan sektor informal lainnya. Pada dasarnya memiliki konsep dasar operasional yang sama dengan konsep dasar pada bank-bank syariah pada umumnya, khususnya pada pada BTM, yaitu:

1. Sistem simpan murni;
2. Bagi hasil;
3. Sistem jual beli dan margin keuntungan;
4. Sistem sewa dan;
5. Sitem upah.⁸

Dalam beroprasi *Baituttamwal* Muhamadiyah Riau lebih menonjolkan sistem pinjaman modal dan margin keutungan. Konsep pembiayaan *mudharabah* ini berbeda dengan pemberian pinjaman (kredit) pada bank konvesional.⁹ Adapun prosedur dalam BTM Muhammadiyah Riau ialah:

1. Debitur adalah pedagang pada tempat yang tetap didalam Pasar Pagi Arengka atau dalam radius 500 M dari Pasar Arengka.
2. Telah berdagang di Pasar Arengka sekurang-kurangnya 1 tahun terakhir secara terus-menerus.
3. Lokasi usaha berada pada tempat yang aman dan tidak dalam wilayah yang berpotensi digusur oleh pemerintah kota Pekanbaru.
4. Tidak terdapat informasi negatif mengenai debitur.

⁸Dokumen BTM Muhammadiyah Riau, 2003.

⁹Yunizel, manager, *wawancara*, Pekanbaru 1 April, 2011.

5. Bersedia disurvei tempat usaha maupun rumah.
6. Bertempat tinggal dalam kecamatan Marpoyan Damai dan kecamatan Tampan.
7. Telah membuka rekening tabungan di BTM Riau sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) minggu dengan mutasi aktif (sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 minggu transaksi setoran).¹⁰

Pelaksanaan *mudharabah* di BTM Muhammadiyah Riau pada umumnya menggunakan jaminan antara lain surat kuasa kepemilikan tempat usaha, Surat Nikah, Ijazah, BPKB kendaraan dan lain-lain. Dan untuk saat ini, jumlah yang diperkenankan adalah minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 5.000.000,- per debitur. Jangka waktu pembiayaan harus singkat, maksimal 6 (enam) bulan dan frekuensi pembayaran harus sesering mungkin. Pembayaran hendaknya dapat dilakukan setiap hari atau maksimum setiap 1 (satu) kali 1 (satu) minggu. Setiap keterlambatan lebih dari 2 (dua) hari (tidak termasuk hari Minggu/ hari besar) dari tanggal jatuh tempo yakni setiap minggu, maka debitur akan dikenai denda berupa biaya penagihan sebesar 5% dari jumlah tunggakan untuk setiap kali penagihan.¹¹

Konsep *mudharabah* dalam Islam haruslah sesuai dengan konsep syariah ini bertujuan untuk menghindarkan dari praktek-praktek riba, setelah seseorang mendapatkan modal, maka dia akan mengelola modal tersebut, dengan perjanjian diawal tentang bagi hasil, ada yang 60/40 ada yang 70/30 tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang bermudhrabah, dan jika

¹⁰Yunizel, Manager, *wawancara*, Pekanbaru 01 April 2011.

¹¹Dokumen BTM Muhamdiyah Riau, 2003.

terjadi kerugian selama kerugian itu tidak disengaja maka pemilik modal lah yang menanggung kerugian tersebut.

Pembagian keuntungan bisa dilakukan setiap hari, tiga hari sekali, satu minggu sekali atau sebulan sekali tergantung lagi kesepakatan diawal juga, setelah disisihkan modal awal dan sisanya menjadi keuntungan yang akan dibagi kedua belah pihak. Jadi di sini atau dikonsep syariah itu pengelola tidak dianjurkan untuk mencicil mengembalikan modalnya, berbeda dengan di BTM Muhamadiyah Riau yang mana pengelola diwajibkan mencicil modal yang dipinjamkan, bahkan keterlambatan cicilan akan dikenai denda atau bunga.¹² Hal ini jelas tidak sejalan dengan konsep syariah.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“PELAKSANAAN MUDHARABAH PADA BTM MUHAMADIYAH RIAU PEKANBARU MENURUT FIQIH MUAMALAH”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau?

¹²Yunizel, Manager, *wawancara*, Pekanbaru 5 Desember 2011.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mualamah terhadap pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
- b. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Fiqh.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung pada BTM Muhammadiyah Riau yang terletak di Jl. Adi Sucipto Komplek Pasar Arengka Pekanbaru Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah karyawan BTM Muhamadiyah Riau yang bekerja pada BTM Muhammadiyah

Pekanbaru Riau. Sedangkan objek dari penelitian ini sendiri yaitu praktek pembiayaan *muharabah* yang diterapkan di BTM Muhamadiyah Riau.

3. Sumber Data

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diambil langsung di lapangan dari karyawan melalui wawancara.
- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diambil dari literature-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data.

- a. *Wawancara*, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau responden tentang masalah yang diteliti.
- b. *Observasi*, yaitu mengamati baik secara langsung dan maupun tidak mengenai kegiatan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BTM Muhammadiyah Pekanbaru Riau.
- c. *Studi Pustaka*, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

6. Metode Penulisan

- a. *Deskriptif*, yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.
- b. *Deduktif*, yaitu menggunakan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. *Induktif*, yaitu kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

E. Sistematika Penulisan

Demi kemudahan penelitian ini, maka saya membagi beberapa topik dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum tentang Lokasi Penelitian, yang terdiri dari Sejarah Singkat BTM Muhammadiyah Riau, Prinsip dan Tujuan Kerja, Struktur Organisasi dan Keanggotaan, Strategi Pemasaran dan Pengembangan Lembaga, Serta Produk-Produk Yang ada di BTM Muhammadiyah Riau.

BAB III: Tinjauan Umum Tentang *mudharabah*, yang terdiri dari Pengertian Mudharabah, Dasar Hukum *mudharabah*, Rukun dan Syarat *mudharabah*, kedudukan *mudharabah*, Perkara yang Membatalkan *mudharabah* dan Pendapat Ulama tentang *mudharabah*.

BAB IV: Pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau Pekanbaru menurut perspektif Fiqih Muamalah yang terdiri dari pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau Pekanbaru dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan *mudharabah* pada BTM Muhammadiyah Riau Pekanbaru.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG BAITUL TAMWIL WAL MAL MUHAMDIAYH RIAU PEKANBARU

A. Sejarah Sngkat Berdirinya BTM Muhamadiyah Riau

Jika dilihat perkembangan yang terjadi dapat diketahui bahwa persaingan antar bank umum swasta nasional untuk pengerahan dana dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas ikut menikmati dampak derelugasi itu sendiri terutama dalam hal ini pihak dunia perbankan.¹³

Dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan dalam skala nasional merupakan program nasional dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan pada seluruh tingkatan masyarakat diseluruh bumi nusantara. Disamping itu peningkatan SDM juga menjadi prioritas utama dalam jangka PJPT II, demikian pula dalam hal era reformasi dan menyongsong terwujudnya Indonsia baru, maka peningkatan SDM, pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja dari kalangan masyarakat ekonomi lemah menjadi perhatian khusus pemerintah.

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan sadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi

¹³Warkum Soemito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1996). Cet ke 1, h. 2.

Baitul Tamwil Wal Mal Muhamdiyah Riau adalah unit usaha yang berbentuk kelompok Swadaya Masyarakat (KMS) sebagai institusi yang formal dan legal dibawah pengawasan Bank Indonesia melalui PHBK (Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat) serta patner PKSP (Pusat Kajian Strategis Pembangunan) dan izin oprasional PINBUK.¹⁴ Serta legalitas koperasi nomor : 003/KS-HBK/VII/93 dan BI-YNBUK No. 10/PINBUK-DKI/XII/98, BH. No.63/BH/KW.K9/II/99.

Jika dilihat kenyataan yang ada pada masyarakat ekonomi menengah dan menengah ke bawah dapat dirasakan langsung karena belum adanya suatu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat baik dalam penerimaan simpanan maupun dalam hal melayani kebutuhan masyarakat akan keperluan modal.

Disamping hal tersebut di atas baitul tamwi wal mal juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan pelayanan akan jasa perbankan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat menengah kebawah umumnya, serta mengurangi praktek ijon dan rentenir.

Melihat kepada urain di atas dengan diutusnya kader-kader organisasi pemuda muhamdiyah mengikuti kegiatan progam penanggulangan-penanggulangan pekerja trampil yang dilaksanakan oleh PINBUK TK II Pekanbaru bersama Kanwil Depnaker Riau setelah melalui proses sosialisai konsep kepada kelembagaan pelajar Islam Indonesia. Maka pada tanggal 27

¹⁴INBUK Adalah Pusat Kajian Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Badan Pekerja dan dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK), yang merupakan lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang dibentuk oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI, dan Direktur utma BMI dengan notaris Ibu Leily Yudoparipurno, SH no. 05 tanggal 13 Maret 1995.

Maret 2003 berdirilah BTM Muhamadiyah Riau yang beralamat Jl. Adi Sucipto Komplek Pasar pagi Arengka didirikan.¹⁵

B. Prinsip dan Tujuan Lembaga

Prinsip yang dimiliki BTM Muhamadiyah Riau yaitu pengelolaan dan penyaluran dana berdasarkan integritas, transparansi serta ekstra hati-hati dalam penyaluran dana.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai BTM Muhamadiyah Riau adalah:

1. Mengalang kekuatan ekonomi masyarakat.
2. Membebaskan pedangan dan pengusaha kecil dari jeratan rentenir.
3. Meningkatkan taraf hidup dan pendaatan para pedangang kecil.
4. Memasyarakatkan etika bisnis yang berdasarkan Syariah.
5. Membantu dan menyantuni kaum dhuafa lainnya dari keuntungan yang diperoleh.
6. Melakukan pembinaan kepada para pedagang dan ekonomi lemah.¹⁶

VISI : Menjadikan lembaga keuangan mikro yang rofesional, amanah dan dapat memberikan serta mengayomi kepada masyarakat kecil menengah

MISI : Meningkatkan taraf hidup pedagang kecil.

Meminimalisir pedagang dalam jeratan rentenir meskipun belum semaksimal mungkin.

¹⁵Yunizel, Manager , *wawancara*, Pekanbaru 5 Desember 2011.

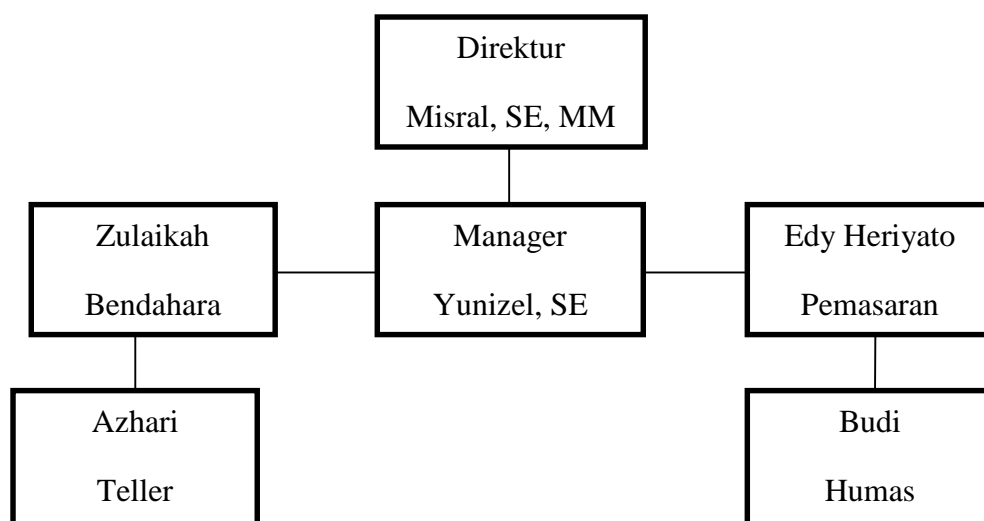
¹⁶Zulaikah , Bendahara, *wawancara*, Pekanbaru 8 Desember 2011.

C. Struktur Organisasi dan Keanggotaan

Secara garis besar organisasi adalah tempat atau wadah persekutuan dua orang atau sekelompok orang yang melakukan kerja sama yang diatur dengan tertib untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama, dalam aturan kerjasama hubungan organisasi terlibat secara horizontal maupun vertical. Demikian pula yang terjadi di BTM Muhamadiyah Riau, dimana setiap anggotanya sudah mendapat tugas masing masing berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga mekanisme kerjanya dapat berjalan lancar.

Stuktur organisasi yang digunakan BTM Muhamadiyah Riau adalah organisasi starta yang dipimpin oleh pengawas yang bertugas mengawasi jalannya laju organisasi yang dijalankan oleh bawahnya yang dipimpin oleh Misral SE, MM sebagai direktur.¹⁷ adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Stuktur Organisasi BTM Muhamadiyah Riau



¹⁷Dokumen BTM Muhamadiyah Riau, 2003.

Berdasarkan peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh BTM Muhamadiyah Riau, mengenai tugas dan fungsi masing-masing pengurus dan staf BTM Muhamadiyah Riau, penulis akan menggambarkan tugas dan fungsi masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi BTM Muhamadiyah Riau yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Direktur :

- a. Bertanggung jawab kepada pengawasnya.
- b. Memanaj secara kolektif.

Fungsinya :

- a. Menyusun progam yang hasilnya dilaporkan kepada pegawai.
- b. Mengatur secara keseluruhan jalannya proses yang dilakukan.

2. Tugas Manager:

- a. Memimpin jalannya kegiatan di BTM Muhamadiyah Riau.
- b. Memberikan persetujuan atas permintaan dana
- c. Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan di BTM Muhamadiyah Riau.
- d. Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang berlangsung

Fungsinya :

- a. Menyiapkan semua kebutuhan yang menyangkut masalah kantor, sarana dan pra sarana.
- b. Melaksanakan setiap progam
- c. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kegiatan kerja serta meningkatkan dedikasi dan loyalitas kerja.

3. Tugas Bendahara:

Yaitu bertugas sebagai orang yang mencairkan dana dan membuat laporan keuangan, yang berfungsi sebagai penanggung jawab atas proses pencairan dana dan keluarnya uang kas BTM Muhamadiyah Riau.

4. Tugas Humas :

- a. Mengenalkan secara langsung BTM Mumahadiyah Riau kepada masyarakat
- b. Merekrut sebanyak-banyaknya anggota untuk dijadikan nasabah tetap.
- c. Mengkondisikan masyarakat agar mudah untuk nantinya memperkenalkan BTM Muhamadiyah Riau.

5. Tugas pemasaran :

- a. Memasrkan produk-produk BTM Mumahadiyah Riau kepada mayarakat
- b. Membuat strategi pemasaran produk ke masyarakat
- c. Mengontrol jalannya poduk-produk BTM Muhamadiyah Riau keada masyarakat

Fungsinya:

Sebagai penanggung jawab dan pelaksanaan proses pemasaran produk-produk BTM Muhamadiyah Riau.

6. Tugas Teller :

- a. Mencatat data nasabah berupa biodata nasabah dan jenis traansaksi yang diinginkan yang akan diberikan kepada bagian adminitrasi.
- b. Memberikan pelayanan kepada nasabah

- c. Bertanggung jawab pada proses awal penerimaan nasabah.

Fungsinya:

Sebagai wakil dari bagian administrasi pada awal penerimaan dan pencatatan nasabah dan juga sebagai penghubung antara nasabah dengan bagian administrasi.

D. Strategi Pemasaran dan Pengembangan Lembaga

Strategi adalah suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bukhari Alma, dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*” mengutip dari pernyataan Kenneth R. Andrews bahwa strategi perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang dikejar perusahaan.¹⁸

Strategi yang digunakan suatu lembaga untuk pengembangan merupakan sekumpulan tindakan yang dapat menjadi acuan atau pedoman bagi manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya dalam memasarkan produk dan jasanya, baik itu dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa-jasa bank lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang berarti posisi yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Pada dasarnya setiap usaha dalam bidang industri perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya termasuk BTM Muhammadiyah Riau,

¹⁸Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta 1992). cet ke 1, h. 22.

supaya maju dan berkembang harus merancang strategi pemasaran untuk produk-produk dan jasa, serta keeksitensianya dapat diakui di tengah-tengah masyarakat. Ada dua jenis strategi yang diterapkan oleh BTM Muhamadiyah Riau yaitu:

1. Pemasaran internal, dimana pemasaran produk BTM Muhamadiyah Riau tidak hanya dilakukan oleh bagian humas maupun promosi saja, akan tetapi meliputi seluruh pegawai BTM itu sendiri sehingga kinerja internal BTM menjadi lebih efektif. Adapun dari segi kualitas SDM dirasa sudah cukup berpengalaman karena sudah dilatih secara efektif dan berkesinambungan oleh BAZIS RIAU.
2. Pemasaran Interaktif, yaitu penerapan yang dilakukan oleh BTM Muhamadiyah Riau yang dapat dari interaksi antara pegawai dan nasabah maupun calon nasabah selama pelayanan berlangsung, dimana ketika nasabah mengemukakan suatu keluhan mengenai produk-produk yang ada, maka pegawai BTM secara sportif dan antusias menjawab sesuai visinya menjadikan BTM sebagai lembaga keuangan mikro yang profesional, amanah dan dapat memberikan serta mengayomi masyarakat kecil menengah.¹⁹

Selain dari pada itu, strategi pemasaran yang biasa dilakukan oleh BTM Muhamadiyah Riau melalui pemasaran produk BTM yang cukup inovatif dan kreatif dengan beragam produk yang ditawarkan seperti produk tabungan, pembiayaan dan investasi. Dan diantara produk pengalangan dana,

¹⁹Yunizel, Manager, *wawancara*, Pekanbaru 5 Desember 2011.

dalam hal ini tabungan dirasa sebanding dengan produk pembiayaan karena tabungan dan pembiayaan saling berkaitan dalam hal dana.

Adapun strategi pemasarn dilihat dari sisi lokasi, BTM Muhamadiyah Riau berada didaerah potensial yang letaknya amat strategis karena lokasinya dekat dengan wilayah pemukiman masyarakat, serta dekat dengan area perdagangan dalam hal ini pasar yang didominasi oleh pedagang kecil, karena seperti pada tujuan awal pendiriannya yang diperuntukan untuk para pedagang dan masyarakat kecil menengah.

Sedangkan strategi pemasaran dari promosi yang ada di BTM Muhamadiyah Riau, diantaranya :

1. Dengan mengeluarkan brosur-brosur yang disebarakan kepada masyarkat umum.
2. Promosi penjualan perorangan dilakukan melalui kunjungan kesuatu forum. Pengajian-pengajian untuk mengisi ceramah mengenai kegiatan usaha BTM Muhamadiyah Riau termasuk didalamnya memperkenalkan dan menawarkan produk-produk yang ada, dan bisa juga dilakukan melalui kontak langsung dengan nasabah.
3. Melakukan promosi secara tepat guna untuk membangun posisi produk yang ada di BTM Muhamadiyah Riau. Promasi ini dilakukan secara terus menerus mengingat rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk yang dikeluarkan oleh BTM Muhamadiyah Riau.²⁰

²⁰Dokumen BTM Muhamadiyah Riau, 2003.

Segala upaya dilakukan dalam strategi pemasaran guna pengembangan lembaga harus mengacu pada fungsi BTM tersebut sebagai lembaga kepercayaan dari masyarakat, karena hal ini merupakan modal awal yang paling berharga bagi sebuah lembaga keuangan. Karena apabila BTM Muhamadiyah Riau sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, upaya apapun yang dilakukan dalam pemasaran semua tidak berguna.

E. Produk Yang Ada di BTM Muhamadiyah Riau

BTM Muhamdiayh Riau memiliki beberapa macam produk baik itu produk tabungan maupun produk pembiayaan, produk-produk tersebut dapat dilihat pada katalog yang dikeluarkan oleh BTM Muhamadiyah Riau dalam bentuk brosur.

Produk tabungan diantaranya :

1. Tabungan Muamalah

Merupakan simpanan praktis bagi setiap muslim karena penarikannya bisa kapan saja untuk keperluan kita semua.

2. Tabungan Haji dan Umroh

Merupakan tabungan yang diperuntukan bagi kaum muslimin yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima, yang penarikannya hanya dapat dilakukan ketika tiba atau saat hendak menunaikan ibadah haji.

3. Tabungan Ibadah Qurban

Tabungan ini diperuntukan untuk menunaikan ibadah qurban yang penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang hari raya qurban, dan BTM

Muhamadiyah Riau dapat pula menyediakan pengadaan hewan qurban tersebut dan menyalurkan kepada yang berhak.

4. Tabungan Pendidikan

Merupakan jenis tabungan yang banyak tersedia pada lembaga lembaga keuangan lainnya, begitu juga dengan BTM Muhammadiyah Riau, dimana kita bisa mempersiapkan dengan lebih matang untuk rencana pendidikan bagi putra putrinya, dan penarikannya dapat diambil ketika tahun ajaran baru telah tiba.

Selain dari itu juga ada produk pembiayaan selain tabungan di BTM Muhamdiyah Riau diantaranya :

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan ini untuk modal kerja, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usahanya. Pembagian bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai dengan Nisbah yang disepakati bersama diantara pihak yang terlibat dalam kerja sama.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan ini untuk investasi dengan sistem jual beli barang yang pembayarannya secara tunai pada saat jatuh tempo atau dapat dicicil, yang keuntungannya diperoleh dari selisih antara harga beli atau pokok dengan harga jual, ditetapkan pada aqad awal.

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan yang bekerja sama anantara pemilik modal dengan nasabahnya masing-masing menyetorkan modal dalam jumlah yang sama

atau berbeda sesuai kesepakatan. Pencampuran modal tersebut digunakan untuk mengelola proyek usaha yang layak, dan pembagian keuntungan akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah atau keuntungan yang disetujui dalam aqad.

F. Perbedaan BTM dengan BMT Muhamadiyah Riau

Perbedaan BMT Muhamadiyah Riau Dengan BTM Muhamadiyah

Riau:

	BMT Muhamadiyah	BTM Muhamadiyah
Nama resmi	<i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Muhamadiyah	<i>Baitut Tamwil Muhammadiyah</i> (BTM) Muhamadiyah
Cakupan identitas	Lembaga sosial (<i>Baitul Maal</i>) dan lembaga keuangan (<i>Baitut Tamwil</i>)	Lembaga keuangan perbankan (<i>Baitut Tamwil</i>) professional murni
Anggota	Para (mantan) aktivis Pemuda Muhammadiyah dan terbuka untuk umum orang Islam	Warga, AUM dan eselon resmi Muhammadiyah.
Afiliasi organisasi	Mandiri	Mandiri
Pedoman akhlak karyawan	Ajaran Islam secara umum	Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM)

Pemilik asset	Lembaga BMT Muhamadiyah	PP Muhammadiyah
Tata-kelola	Sistem mandiri	Sistem standar versi BTM

Mengapa memilih BTM Muhammadiyah Riau sebagai tujuan perubahan? Karena sesuai latar-belakang, yakni dari Pemuda Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah dan karena BTM lebih menentramkan hati (*tathmainul qulub*), sudah jelas teruji dan terpercaya serta merupakan lembaga resmi di bawah persyarikatan Muhammadiyah.²¹

²¹Zulaikah, Bendahara, wawancara, Pekanbaru 8 Desember 2011.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP MUDHARABAH DAN RIBA

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dhara* yaitu, berarti memukul atau barjatan, pengertian memukul atau barjatan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *qardu* yang berarti *al-qatlu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.²²

Qirad menurut istilah artinya akad penyerahan harta kepada seseorang untuk berdagang dengan untung diterima bersama dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi. Menurut bahasa kata Abdurahman al-Jaziry yang dikutip oleh Helmi Karim dalam menyatakan bahwa Mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan akan dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.²⁴

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 13, Terjemahan, Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: al-Maarif, 1996), cet ke 1, h. 36.

²³Wahabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 446.

²⁴Wahabah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 446.

Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal atau uang dengan pengelola dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha dan pengelola setuju untuk mengelolanya dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Apa bila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apa bila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengelola.²⁵

Qirad dengan *kasrah* huruf *qap*, iyalah memperkejakan seseorang dengan bagi keuntngan ini menurut bahasa Hijaz. Dalam defenisi lain adalah pemberian modal kepada sesorang untuk diperdagangkan dengan system bagi laba dengan perjanjian.²⁶

Mudharaabah dalam terminologi hukum adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok diberikan oleh pemilik kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dimana kedua kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan, kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta.²⁷

Menurut istilah syara' *Mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdangangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak meberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka

²⁵Warkum Soemitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), cet ke 1, h. 11.

²⁶Abu Bakar Muhamad, trj. *Subulussalam*, (Surabaya: Al-Iklas, 1995), cet. 1, h. 275

²⁷Ar Rahman I, *Syariah III Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet ke, 1, h. 37.

berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mudharabah* semacam syarikat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lainnya dibagi antara mereka.²⁹

Begitu memasyarakatnya tentang bagi hasil ini, nampaknya tidak memandai hanya diatur oleh adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah saja, malah undang-undang pun ikut mengatur nya. Hal ini tergambar dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pada tanggal 7 Januari 1960, yang isinya tentang perjanjian bagi hasil. Apabila diperhatikan yang menjadi tujuan utama lahir Undang-undang ini sebagaimana termuat dalam memori penjelasan Undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum point (3) disebutkan sebagai berikut:

Dalam rangka usaha akan dilindungi golongan ekonominya lemah terdapat praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka perjanjian bagi hasil tersebut dengan bermaksud:

- a) Agar perjanjian hasil antara pemilik dengan pengarap/pengelola dilakukan atas dasar yang adil.
- b) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan pengelola, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak.

²⁸*Ibid.*, h. 11

²⁹Hasbi Ash-Shiddegy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet ke 1, h, 90.

c) Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas.³⁰

B. Fungsi Mudharabah

Bermuamalah merupakan salah satu cara manusia dalam mencari rezeki untuk menutupi keperluan hidupnya beserta tanggungannya. Dengan cara ini pula manusia dapat menolak sistem riba dan spekulasi yang tidak sehat sebagai alternatif sistem ekonomi.³¹ *Mudharabah* biasanya diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan usaha, dalam sistem ini terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Setelah usaha selesai maka pihak pengelola dan pihak pemilik modal sama-sama melakukan pembagian hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Keuntungan ataupun resiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pola ini juga dapat membantu perkembangan ekonomi di sektor riil, yaitu dengan adanya pembiayaan yang diberikan para pemilik modal untuk pihak pengelola yang ingin mengembangkan usahanya dalam bentuk kerjasama.

Keberadaan sistem *mudharabah* berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Adapun fungsi pembiayaan *mudharabah* yaitu:

³⁰Hairuman Pasaribu, Suhwrdi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet ke 1, h. 25.

³¹Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet ke 3, h. 54.

1. Akses masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Dapat menimbulkan motivasi masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan cara berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena akses pembiayaan mudah didapatkan oleh masyarakat.
4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.³²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pembiayaan *mudharabah* secara umum yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan adanya pembiayaan *mudharabah* banyak usaha serta kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan tidak terkendala lagi dengan masalah permodalan

C. Landasan Hukum Mudharabah

Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan al-Quran, Sunah, Ijma, Qiyas.³³ Hanya saja hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui.³⁴

³²*Ibid.*, h. 56.

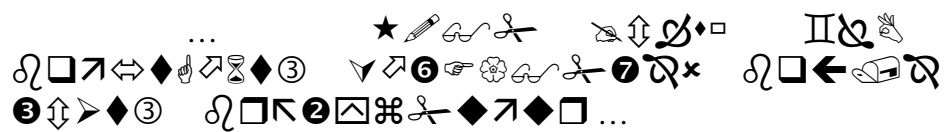
³³Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 447.

³⁴*Ibid.*, h. 447.

Mudharabah juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Siti Khodijah, dengan modal dari Siti Khadijah beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan, hal ini terjadi sebelum beliau diangkat menjadi rasul.³⁵

Adapun yang menjadi dasar hukum *mudharabah* adalah

- a. al-Quran firman Allah SWT (Q.S: al-Muzami ayat 20), yang berbunyi



Artinya :“.....dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”.³⁶

- b. As-Sunah

Diantara Hadist Nabi Muhamad SWA yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

شَلَا شَ فِهِنَّ الْبَرْكَةُ الْاَبِيخْ اِلَى اَجَلَا وَ الْمَقَارِضَةُ وَخَلَطَ الْبُرْ بِالشَّعِيرِ الْبَيْتِ وَلَا الْبَيْعِ

Artinya : *Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga dan bukan untuk diperjual belikan.*³⁷

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 13*, Terj. Kamludin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-a'arif, 1996), cet ke 1, h. 36.

³⁶Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Gema Insani, 2002). cet ke 4, h. 576.

³⁷*Ibid.*, h. 933

c. Ijma

Diantara Ijma dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.³⁸

Para ahli hukum islam secara sepakat mengakui kebsahan *mudharabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat pada satu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah di *qiyas* kan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disuatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁹

D. Rukun dan Syarat Mudharabah

³⁸Wahab Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 447.

³⁹Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 226

Mudharabah meruakan suatu transaksi jual beli, sebagaimana rukun pada aqad-aqad lainnya yaitu diantaranya ijab dan qabul, yang keluar dari kedua belah pihak yang unya wewenang aqad. Menurut ulama Syafi'iyah⁴⁰ rukun-rukun *mudharabah* ada 5 yaitu:

1. Pemilik modal yang menyerahkan modalnya. Modal yang diserahkan itu harus berbentuk uang tunai, apabila barang tersebut atau modal berbentuk mas atau perak batangan, atau mas dan perak perhiasan maka *mudharabah* tersebut batal.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal. Dalam artikata ini juga bisa diartikan bagi yang akanbermudharabah hendaknya orang yang telah dewasa, maka di batalkan aqad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang dibawah pengampunan.
3. *Aqad mudharabah*. Adalah bentuk kontrak kedua belah pihak dima satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modal nya untumk dikelola oleh pihak kedua.
4. Harta atau modal. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta.

⁴⁰Wahabah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I h, 449.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri.

E. Syarat-syarat Sah Mudharabah

Berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan berakad), modal, dan laba.

1. Syarat *aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan aqad, yakni pemilik modal dan pengelola adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi Negara Islam.⁴¹

Adapun ulama Malikiyah.⁴² memakruhkan mudharabah dengan kafir *dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika melakukan riba.

2. Syarat modal

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
- b. Bagi yang melakukan aqad disyaratkan mampu melakukan *tasharuff*, maka dibatalkan aqad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang dibawah pengampunan.

⁴¹Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001) , cet ke 2, h. 228.

⁴² *Ibid*.

- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
 - d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
 - e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan dibagi dua dan qabul dari pengelola
3. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola untuk memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan.⁴³
4. Syarat-syarat keuntungan
- a. Besarnya keuntungan harus diketahui

Hal ini karena *ma'quud alaih* (objek aqad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan, sementara ketidak jelasan terhadap *ma'quud alaih* dapat menyebabkan batalnya aqad.⁴⁴
 - b. Laba Harus berupa Bagian yang Umum

⁴³. *Ibid.*, H. 228.

⁴⁴Wahab Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 487.

Pembagian laba harus sesuai dengan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan aqad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik, sedangkan setengah lainnya untuk pengelola, akan tetapi tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.⁴⁵

Mudharabah dilakukan atas dasar kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola tentang keteguhannya memegang amanat dan kemampuan kerja, oleh karena itu pelaksana tidak menanggung harta (modal) kecuali apabila terjadi kesenjangan, maka apabila harta itu rusak tanpa disengaja oleh pengelola, maka tidak ada kewajiban apa-apa.

Adapun dianggap pelanggaran yang disengaja oleh pelaksana yang mewajibkan dia menanggung harta, antara lain ialah apabila modal yang disediakan dimudharabahkan dengannya, ternyata dia alihkan kepada orang lain supaya orang tersebut bisa bermudharabah. Dalam hal ini wajib menanggung kerugian apabila terjadi kerugian.

F. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah ada dua macam, yaitu *mudharabah mutlak (al-muthlaq)* dan *mudharabah terikat (al-muqayyad)*.⁴⁶

Mudharabah mutlaq adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “ *saya serahkan uang*

⁴⁵. Rachmat Syafei, *op. cit* h.229.

⁴⁶Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia 2001), cet ke 2, h.227.

ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.”

Mudharabah muqayyad adalah penyerahan modal seseorang kepada pengelola dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Jakarta atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.

G. Hal-hal yang Berhubungan dengan Mudharabah

1. Fasakhnya mudharabah dan larangan Usaha atau Pemecatan

Mudharabah batal dengan adanya *fasakh* dan adanya larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu *mudharib* mengetahuinya adanya *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam bentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, maka pemecatannya tidak sah.⁴⁷

2. Kematian Salah Satu Aqid

Jika pemilik modal meninggal dunia maka *mudharabah* menjadi *fasakh*, maka pengelola tidak ada hak untuk menggunakan modal. Dan jika ia bertindak menggunakan modal yang telah meninggal dan tanpa ahli warisnya maka perbuatan ini menjadi *ghasab* (merampas) dan ia wajib menjamin. Dan ketika *mudharabah* tersebut batal, sedangkan modal

⁴⁷Wahab Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 511.

berbentuk dagangan, maka pengelola harus membagikan nya kepada ahli waris, karena yang demikian hak berdua, demikian menurut mazhab Syafi'I.⁴⁸

3. Salah Seorang Aqid Gila

Mudharabah batal menurut ulama selain Syafi'ah.⁴⁹ Dengan gila nya salah satu pelaku akad, jika gila nya itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan)

4. Pemilik Modal Murtad

Apa bila pemilik modal murtad atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau tergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Hanifah.⁵⁰ Hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati.

5. Modal Rusak ditangan Pengelola

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini dikarenakan harus dipegang oleh pengelola. Jika modal rusak maka *mudharabah* batal.⁵¹

H. Pertentangan antara Pemilik dan pengusaha

1. Perbedaan Dalam Mengusahakan Harta

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet ke 2, h. 238.

⁵¹*Ibid.*, h. 238.

Diantara pemilik modal dan pengelola terkadang ada perbedaan dalam hal keumuman mengusahakan harta, kerusakan harta, ukuran laba yang disyaratkan, serta ukuran modal.⁵²

Jika terjadi perbedaan antara pemilik dan pengelola, yaitu satu pihak menyangkut sesuatu yang umum dan pihak lain menyangkut masalah khusus, yang diterima adalah pernyataan yang menyangkut hal-hal yang umum, dalam perdagangan, yakni menyangkut pendapatan laba, yang dapat diperoleh dengan menerapkan ketentuan-ketentuan umum.⁵³

Jika kedua orang yang berakad berbeda dalam jenis hal usaha atau jenis barang yang harus dibeli, maka yang diterima adalah ucapan pemilik modal, jika pemilik modal mengatakan bahwa modal harus diusahakan kepada gandum, tetapi pengelola menyatakan bahwa modal harus diusahakan kepada pakian, yang diterima adalah ucapan pemilik modal sebab pengelola harus mengusahakan hartanya atas seizin pemilik harta.⁵⁴

2. Perkara dalam Harta yang Rusak

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang rusaknya harta, seperti pengusaha menyatakan bahwa kerusakan disebabkan pemilik modal, tetapi pemilik modal mengingkarinya maka yang diterima, berdasarkan kesepakatan ulama,

⁵²Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet. 2 h. 234.

⁵³*Ibid.*, h.234.

⁵⁴*Ibid.*, h.235.

adalah ucapan pengelola sebab pada dasarnya ucapan pengelola adalah amanah, yakni tidak ada khianat.⁵⁵

3. Perbedaan tentang Pengembalian Harta

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pengelola dan pemilik modal tentang pengembalian harta, seperti ucapan pengusaha, bahwa modal telah dikembalikan, yang diterima adalah ucapan pemilik modal menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Adapun menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah yang dapat diterima adalah ucapan pengelola sebab pengelola dipercaya.

4. Perbedaan dalam Jumlah Modal

Jika mereka berdua berselisih dalam masalah besarnya modal, maka perkataan *mudharib* lah yang diterima menurut kesepakatan para ulama.⁵⁶

5. Perselisihan dalam Jumlah Modal

Jika pemilik modal dan mudharib berselisih dalam masalah besarnya keuntungan yang disepakati dalam aqad, maka menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah dalam riwayat Ahmad.⁵⁷ Perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik modal.

Ulama Malikiyah.⁵⁸ Berpendapat, yang diterima adalah ucapan pengelola beserta sumpahnya dengan syarat:

⁵⁵*Ibid.*, h. 236.

⁵⁶Wahab Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 509.

⁵⁷*Ibid.*, h. 509.

⁵⁸*Ibid.*, h. 510.

- a. Harus sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam *mudharabah*.
- b. Harta masih dipegang pengelola, modal itu masih ada pada *mudharib*, baik secara hakiki mau pun hukmi, seperti jika barang itu sebagai *wadi'ah* pada orang lain.

6. Perselisihan dalam Sifat Modal

Jika mereka berdua berselisih dalam sifat modal, seperti jika pemilik modal berkata,” Saya memberikan modal pada mu untuk *mudharabah*, *wadi'ah*, atau *ibdha'* dalam membeli dan menjual, dan amil berakata, “Bukan, tapi kamu memberikan modal itu sebagai pinjaman dan seluruh keuntungannya untuk ku”, maka menurut Syafi'iah.⁵⁹, perkataan pemilik modal lah yang diterima.

I. Resiko Kerugian Dalam Akad *Mudharabah*

Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul mal* sendiri. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan

⁵⁹*Ibid.*, h. 511.

kepadanya. Abdurahman Al-Jaziri.⁶⁰ mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar.⁶¹

J. Riba dalam Islam

1. Arti Riba

Ditinjau dari segi pengertian bahasa, riba berarti nilai lebih (tambahan). Sedangkan menurut pengertian syara' riba berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam dimana salah satu pihak merasa berat dan rugi sedangkan pihak lainnya menarik keuntungan tanpa menanggung resiko.⁶²

Para ulama.⁶³ sepakat riba itu ada empat macam yaitu :

a. *Riba Fadhl*

Riba fadhl adalah jual-beli yang disertai adanya tambhanan salah satu pengganti dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang

⁶⁰Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet ke 2, h. 357.

⁶¹*Ibid.* h. 357.

⁶²H. Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar algensindo. 1994) cet ke 27, h. 290.

⁶³Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 309.

sejenis, seperti menjual satu kilo gram kentang dengan setengah kilo gram kentang, emas dengan perak.⁶⁴

b. *Riba Nasi'ah*

Riba Nasiah yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.⁶⁵

c. *Riba Yad*

Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan, yakni bercerai-cerai antara dua orang yang akad sebelum timbangan terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat aqad.⁶⁶

Para imam mazhab.⁶⁷ Sepakat tentang bolehnya menjual emas dengan perak, perak dengan emas yang tidak sama satu sama lainnya. Tidak boleh menjual gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali jika sama banyaknya dan kontan. Hal ini pun jika dilakukan dengan penakaran atau timbangan.

2. Hukum Riba atau Beberapa Ayat yang Melarang Riba

Riba diharamkan berdasarkan al-Quran sunah dan ijma.⁶⁸ Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

⁶⁴Rachmat Sya'fi. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001) cet ke. 2, h. 264.

⁶⁵*Ibid.*, h. 264.

⁶⁶*Ibid.*, h. 264.

⁶⁷Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung, 2012). Cet ke 13, h. 215.

⁶⁸Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 307.

a. Firman Allah SWT: ... الْبَيْعِ ...

Artinya :*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. al-Baqarah: 275)*

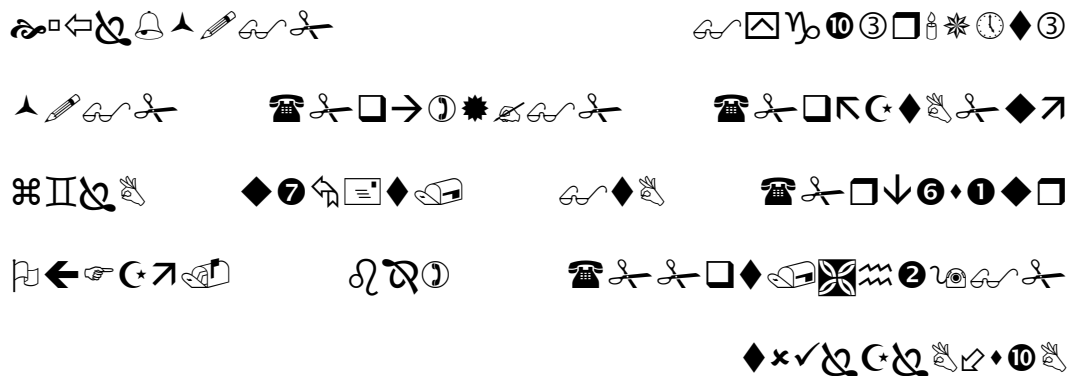
b. Saksi riba meliputi semua pihak yang terlibat.

عَلَيْهِ , وَمُؤْكَلُهُ وَكَاتِبُهُ وَقَالَ وَشَاهِدَيْهِ : سَوَاءٌ هُمْ

Artinya: *Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a bahwa Rasulullah SAW.*

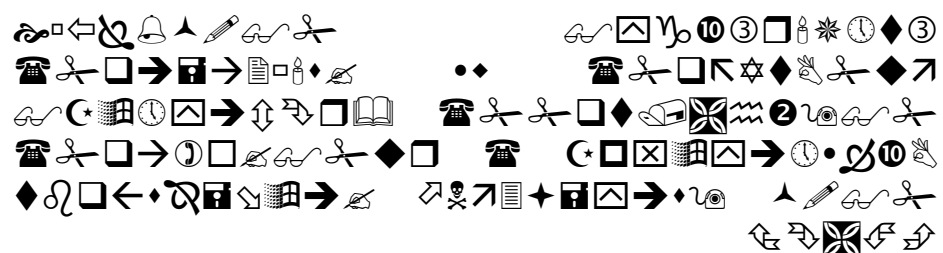
Telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya.(HR. Abu Dawud dan lain-lain)

c. Larangan menggunakan hasil (sisa) riba. Firman Allah SWT :



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (QS. al-Baqarah: 278)*

d. Larangan Allah memakan riba. Firman Allah SWT:



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. al-Imran: 130)*

e. Sanksi bagi pemakan riba. Firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. al-Baqarah :275)*

f. Pernyataan Allah tentang riba. Firman Allah SWT :



Artinya : *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (QS. al-Baqarah: 276).⁶⁹*

Dari beberapa ayat diatas diatas yang telah disebutkan tadi jelaslah bagi kita bahwa riba bahwa riba itu betul betul dilarang dalam agama

⁶⁹Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Algensindo. 1994) cet ke 27, h. 292.

Islam. Dijelaskan bahwa riba nasi'ah jelas dilarang karena ayat tersebut diturunkan karenanya (kejadian di masa jahiliyah). Jadi dengan kata lain turunya ayat ini karena adanya riba nasi'ah. Kata Ibnu Qaiyim dalam kitab *Ilamil Muaqai'in*, “ *riba nasi'ah* adalah riba yang dilakukan kaum jahili pada masa jahiliyah. Mereka menta-khirkkan utang dari waktu yang semestinya dengan menambah bayaran, apabila terlambat lagi di, ditambah pula terus menerus, tiap-tiap keterlambatan wajib ditambah lagi, sampai yang asalnya hutang seratus rupiah bias menjadi beribu-ribu, kalau dengan gadai barang yang digadai tetap tergadai.”⁷⁰

Biasanya tidak ada yang mau melakukan nya kecuali orang yang terdesak, walaupun dia tau dan yakin akan akibat yang menimpa nya, tetapi karena terdesak oleh kebutuhan, terpaksa dipikulnya juga meskipun akan meruntuhkan bahunya juga. Apabila yang berhutang memandang bahwa yang berpiutang tidak akan mendakwa, menagih pun tidak bila diberi bunganya, tentu akan diberinya walaupun tambahan yang diberikan kepadanya itu di dapatnya dari pinjaman lainya pula kepada yang lain, atau dengan menjul harta yang ada. Keadaan terus-menerus yang demikian hingga habislah hartanya. Sesudah hartanya habis, dia pun akan terus menerus mendapat tagihan, kadang-kadang sampai berakhir dengan masuk penjara atau barang yang di gadai menjadi korban. Adakah kemudratan dan kecelakaan yang lebih dari itu? Sikaya, meskipun tampaknya untung, tetapi iya telah memudratkan sendiri saudaranya, menganiyaya sesama

⁷⁰Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *op. cit.*, h. 293.

manusia, serta akan mengkalutkan masyarakat. Inilah yang dimaksud oleh ayat Allah yang melarang mengambil harta dengan batil. Meskipun skarang si kaya kelihatan untung, tetapi kalau kita ingat akan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 276 dan surat ar-Rum ayat 39 diatas, kita percaya bahwa hartanya tidak akan membuahkan kebaikan padanya.⁷¹

Adapun hikmah pengaharaman riba karena riba tersebut mengakibatkan kesusahan bagi orang-orang yang membutuhkan, mematikan unsur-unsur kasih sayang dan rahmat bagi manusia, menghilangkan nilai tolong menolong dalam kehidupan, eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin, dan menyebabkan *mudhrat* yang besar bagi masyarakat. Jika uang telah menjadi barang komersial lainnya, baik secara tunai maupun tidak, maka rusak lah sitem penilai barang-barang yang seharus nya bersifat terbatas dan tetap, tidak naik tidak turun.⁷²

K. Pendapat Ulama tentang ‘Illat Riba

Ulama sepakat menetapkan *riba fadhl* pada tujuh barang, seperti terdapat pada nas, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering.⁷³ Hikmah hukum berbeda dengan ‘*illat*’ hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam

⁷¹Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar algensindo. 1994) cet ke 27, H 293.

⁷²Rasjid Sulaiman, *op cit.*, h. 319.

⁷³Wahabah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. I h. 327.

kerusakan. *'Illat* hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.⁷⁴

Ulama sepakat menetapkan *riba fadhl* pada tujuh barang, seperti terdapat para *nash*, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering.⁷⁵ Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.

Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat:

- a. Zhahiriyyah.⁷⁶ hanya mengharamkan ke tujuh benda tersebut.
- b. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.⁷⁷ *Riba fadhl* terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang di timbang.
- c. Imam Syafi'i.⁷⁸ Berpendapat bahwa *riba fadhl* dikhususkan pada emas, perak dan makanan meskipun tidak ditimbang.
- d. Imam Malik.⁷⁹ mengkhususkan pada makanan pokok.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan pendapat tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1. Madzab Hanafi

Para ulama Hanafiah.⁸⁰ dalam pendapatnya menyatakan *Illat* riba adalah takaran dan timbangan, berargumen bahwa kesamaan dalam dua

⁷⁴Jalaludin Al-Mahli, *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*, (Surabaya: Syirkah Nur Asia, 2004), cet ke 4, hal 245.

⁷⁵Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet ke 2, h.264.

⁷⁶Wahab Az-Zuhaili, *Loc.cit*.

⁷⁷*Ibid.*, h. 320.

⁷⁸*Ibid.*, h. 320.

⁷⁹*Ibid.*, h. 321.

⁸⁰Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 321.

barang yang dipertukarkan adalah syarat ke absahan jual beli, dan keharaman riba adalah karena adanya tambahan pada barang itu tanpa imbalan sama sekali

2. Madzab Malikiyah

Illat diharamkannya riba menurut ulama' Malikiyah.⁸¹ pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. Illat dalam pengharaman *riba nasiah* adalah barang yang dapat dimakan untuk selain pengobatan, baik termasuk dalam pokok dan dapat disimpan, atau hanya merupakan bahan pokok saja, maupun bukan merupakan bahan pokok dan tidak dapat disimpan, seperti berbagai jenis sayuran seperti labu, semangka, jeruk, sawi, wortel, dan juga macam buah-buahan (kurma basah) pisang, dan apel.

3. Madzab Syafi'i

Para ulama Syafi'iah.⁸² Berpendapat bahwa *illat* riba dalam jenis emas dan perak adalah nilai. Maksudnya kedua barang tersebut merupakan alat penilai bagi barang, baik yang berbentuk (koin mata uang dan perhiasan) maupun tidak. Yang dimaksud dengan nilai disini adalah nilai yang ada secara umum dalam suatu barang, sehingga hal itu terintegasikan pada fulus, yaitu koin yang terbuat dari barang tambang selain emas dan perak seperti nikel, perunggu, dan tembaga.

⁸¹*Ibid.*, h. 321.

⁸²*Ibid.*, h. 322.

Makanan adalah *illat* pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria sebagai berikut.⁸³

- a. Sesuatu yang biasa kriteria berikut ditujukan sebagai makanan atau makanan pokok;
- b. Makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam *nash* adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering;
- c. Makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat.

Ulama Syafi'iyah.⁸⁴ Antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan.

Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Agar terhindar dari unsur riba, menurut ulama Syafi'iyah.⁸⁵ jual beli memenuhi kriteria:

- a. Dilakukan waktu akad, tidak mengaitkan pembayarannya pada masa yang akan datang
- b. Sama ukuranya
- c. Tumpang terima.

4. Madzhab Hambali

Pada madzhab Hambali.⁸⁶ terdapat tiga riwayat tentang *illat* riba, yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya

⁸³Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet ke 2, h. 267.

⁸⁴*Ibid.*, h. 268.

⁸⁵Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke I, h. 324.

saja, ulama Hanafiyah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma.⁸⁷

Riwayat kedua adalah sama dengan *illat* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah.⁸⁸ Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan.⁸⁹

Kesimpulan dari pendapat ulama *illat* pengharaman ketidak samaan ukuran dua barang yang dipertkarkan untuk jenis makanan, menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliyah adalah barang yang ditakar dan ditimbang, menurut imam Malik adalah makan pokok dan tahan lama, menurut Imam Syafi'i adalah makanan.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan jika riba itu dilarang oleh agama Islam dalam kehidupan ber muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

⁸⁶*Ibid.*, h. 325.

⁸⁷*Ibid.*, h. 320.

⁸⁸*Ibid.*, h. 326.

⁸⁹*Ibid.*, h. 326.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL (MUDHARABAH) PADA BAITUL TAMWIL WAL MAL MUHAMADIYAH

A. Tata Cara Pelaksanaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada *Baitul Tamwil Wal Mall Muhamadiyah Riau*

Data pelaksanaan *mudharabah* di *baitul tamwil wal mall muhadiyah riau* dijangin melalaui wawancara. Wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang berisi aspek-aspek pelaksanaan *mudharabah* yang meliputi modal, prosedur permodalan, hubungan pemodal (*baitul tamwil wal mall*) dengan pengelola, pembagian laba serta aspek yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian.

Hasil wawancara berkenaan dengan bentuk modal yang diberikan *baitul tamwil wal mall* kepada pengelola dalam pelaksanaan *mudharabah* menunjukan bahwa modal yang diberikan pihak *baitul tamwil wal mall* kepada pengelola adalah berbentuk uang, bukan yang lainnya seperti emas atau barang.⁹⁰ Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan nasabah yakni Andi (32 tahun) yang menyatakan bahwa ia telah memperoleh pinjaman dana dari *baitul tamwil wal mall* sebesar Rp. 750.000 dalam bentuk uang.⁹¹

Tindakan *baitul tamwil wal mall* memberikan modal kepada pengelola dalam pelaksanaan *mudharabah* berbentuk uang, bukan yang lain seperti

⁹⁰Zulaikah, Bendahara, wawancara, Pekanbaru 8 Desember 2011.

⁹¹Andi, pengelola, wawancara, Pasar Pagi Arengka 10 Desember 2011.

emas atau barang sesuai dengan kaidah *mudharabah* bahwa modal *mudharabah* harus merupakan mata uang yang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak pengelola setelah ijab qabul, sesuai dengan cara-cara yang telah disepakati.⁹² Jika modal tersebut berbentuk emas atau barang maka tidak sah.⁹³

Ada sebagian ulama yang menyatakan kebolehan menggunakan barang dengan syarat harus diharga dengan uang terlebih dahulu oleh sipemilik modal bersama pelaksana yang mengembangkannya.⁹⁴

Dari berbagai pendapat ulama yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa khusus mengenai bentuk modal yang diberikan oleh *baitul tamwil wal mall* Muhamadiyah Riau sudah memenuhi persyaratan hukum islam.

Dana yang diberikan oleh *baaitul tamwil wal mall* kepada pengelola adalah berbentuk uang tunai dan bukan berbentuk angsuran. Dalam hal ini pihak *baitul tamwil wal mall* memberikan dana kepada pengelola sekaligus. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pengelola yakni Anwar (38 tahun) diketahui bahwa ia memperoleh dana 2 juta rupiah dalam bentuk tunai.⁹⁵

⁹²Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet ke 2, h. 87-89.

⁹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), cet ke 4, h 33.

⁹⁴.Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Haaju al-Muskilah Iqlis Haasdiyah*, terj. Ashari Umar, *Menangulangi Krisis Secara Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1985), cet ke 3, h 198.

⁹⁵Anwar , Pengelola, wawancara, Pasar Pagi arengka 10 Desember 2011.

Dengan diberikannya dana oleh *baitul tamwil wal mall* kepada pengelola berbentuk uang dan bukan bentuk angsuran atau berkala, hal ini tentu akan mempermudah pengelola dalam menjalankan usahanya karena ia bisa memperhitungkan besarnya modal yang akan dijalankan. Dengan demikian praktek ini sejalan dengan prinsip pelaksanaan *mudharabah* yakni tidak boleh mempersulit pengelola dalam menjalankan usahanya.⁹⁶

Setelah pengelola menerima dana dalam bentuk tunai, maka pengelola bebas dalam menjalankan usahanya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan pengurus *baitul tamwil wal mall* yang menyatakan bahwa pihaknya tidak ikut campur tangan dalam usaha pihak pengelola. Dan pihak *baitul tamwil wal mall* tidak melakukan control terhadap keuangan dari pihak pengelola.

Tindakan ini juga sejalan dengan prinsip pelaksanaan *mudharabah* yakni pengelola tidak boleh dipersulit dalam melaksanakan jual beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*. Kadang kadang pengelola memperoleh kesempatan untuk mendapatkan laba, akan tetapi karena ia ditanya terus oleh pemodal, akhirnya usahanya gagal. Dengan demikian gagal pula tujuan *mudharabah* yang sebenarnya yakni memperoleh keuntungan.⁹⁷ Dengan demikian dalam aspek ini pelaksanaan *mudharabah* oleh pihak *baitul tamwil wal mall* sudah sesuai dengan salah satu prinsip yang ditetapkan Islam.

⁹⁶Ashari Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: As-Syifa', 1994), cet ke 2, h 312.

⁹⁷*Ibid*, hal 312.

Pihak *baitul tamwil wal mall* memberi pinjaman kepada pengelola yaitu pengelola yang mempunyai usaha atau sudah berusaha, usahanya jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola (peminjam) untuk mendapatkan pinjaman dari pihak *baitul tamwil wal mall* yaitu :

- a. Identitas diri (KTP)
- b. Telah berdagang di Pasar Arengka sekurang-kurangnya 1 tahun terakhir secara terus-menerus
- c. Lokasi usaha berada pada tempat yang aman dan tidak dalam wilayah yang berpotensi digusur oleh pemerintah Kota Pekanbaru
- d. Tidak terdapat informasi negatif mengenai debitur
- e. Bersedia di survei tempat usaha maupun rumah
- f. Bertempat tinggal dalam kecamatan Marpoyan Damai dan kecamatan Tampan
- g. Telah membuka rekening tabungan di BTM Riau sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) minggu dengan mutasi aktif (sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 minggu transaksi setoran)
- h. Angunan atau jaminan
 - 1) Barang (surat kuasa kepemilikan tempat, BPKB serta surat berharga lainnya
 - 2) Orang yang menjamin (orang yang bias dipercayai, dan dibuat perjanjian diatas matrai).⁹⁸

⁹⁸Yunizel, Manager, wawancara, Pekanbaru 5 Desember 2011.

Margin atau keuntungan untuk BTM Muhamdiyah Riau adalah sekurang-kurangnya 40% dari keuntungan atau sekurang-kurangnya 3% dari jumlah yang disalurkan (mana yang lebih besar).⁹⁹

Adanya persyaratan di atas sangat berguna agar tujuan *mudharabah* yang dilaksanakan benar benar tercapai dan tepat sasaran. Disamping itu juga diperlukan agar usaha yang dijalankan tersebut benar-benar usaha atau proyek yang halal dan tidak bertentangan dengan Islam.¹⁰⁰

Apabila calon pengelola sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan *baitul tamwil wal mal*, maka pengelola bisa memperoleh dana pinjaman maksimal RP.10.000.000.- dan minimal RP. 500.000.- per nasabah. Tergantung jenis usaha dan besarnya modal yang diperlukan pengelola. Hal ini bias terlaksana setelah melakukan kajian mendalam pihak *baitul tamwil wal mal* terhadap proposal yang diajukan pengelola.¹⁰¹ Kajian ini sangat penting agar kucuran dana benar- benar tepat sasaran dan dapat menghasilkan keuntungan baik bagi pemodal maupun pengelola.

Mengenai pengelola, dalam sistim *mudharabah baitul tamwil wal mal* tidak mengkhususkan hanya memberikan modal kepada pengelola beragama Islam saja tetapi juga membuka peluang kepada pengelola non muslim dengan catatan tidak bergeser dari prinsip pelaksanaan *mudharabah* yang

⁹⁹Yunizel, Manager, *wawancara*, Pekanbaru 5 Desember 2011.

¹⁰⁰Warkum Soemitro, *op.cit.*, h. 88.

¹⁰¹Zulaikah, Bendahara, *wawancara*, Pekanbaru 8 Desember 2011.

telah digariskan Islam. Namun demikian, sampai saat ini nasabah keseluruhannya adalah muslim.¹⁰²

Mengenai nasabah dalam pelaksanaan *mudharabah* tidak ada ketentuan apakah ia Islam atau non Islam. Baik itu prinsip maupun sarat yang ditetapkan ulama tidak satupun yang melarang pelaksanaan *mudharabah* dengan pengelola yang non Islam. Namun demikian dalam pelaksanaan tersebut hendaknya sejalan dengan prinsip dan sarat yang telah ditetapkan Islam mengenai pelaksanaan *mudharabah*.

Untuk menghindari kemungkinan adanya perselisihan mengenai pembagian laba, maka tata cara pembagian laba usaha antara *baitul tamwil wal mal* dengan pengelola di musyawarahkan. Hasil musyawarah ini kemudian dituangkan dalam bentuk akad yang menjadi pedoman bagi *baitul tamwil wal mal* dan pihak pengelola. Apabila telah sampai masa pembagian laba, maka pihak *baitul tamwil wal mal* dan pengelola tinggal mempedomani akad tentang pembagian laba sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak *baitul tamwil wal mal* dan pihak pengelola. Tindakan ini sejalan dengan yang ditetapkan dalam pelaksanaan *mudharabah* yakni pembagian laba hendaklah ditentukan dalam akad. Disamping itu hendaklah dibagi bersama antara pengelola dan pemilik modal dimana yang satu mendapat bagian laba dari jerih payah dan yang lain mengambil bagian dari modalnya.¹⁰³

¹⁰²Yunizel, Manager, wawancara, Pekanbaru 5 Desember 2011.

¹⁰³Ansari Umar, *op.cit.*, h. 312.

Apabila usaha pengelola tidak menunjukkan peningkatan dan cenderung merugi, maka pihak *baitul tamwil wal mal* akan memberikan masukan terhadap pengelola tersebut akan dan menyelidiki apa faktor penyebab usaha tersebut tidak meningkat. Dalam hal ini pihak *baitul tamwil wal mal* tidak akan mencampuri urusan internal usaha pengelola, akan tetapi hanya memberikan jalan keluar agar usaha pihak pengelola bisa meningkat dan terhindar dari kerugian sehingga pengelola tidak kesulitan dalam mengembalikan modal yang telah dipinjam dari pihak *baitul tamwil wal ma.l*¹⁰⁴

Tindakan ini juga sesuai dengan prinsip *mudharabah* diaman pemodal tidak boleh mencampuri urusan internal usaha pihak pengelola. Namun demikian sebagai pemilik modal, maka pihak *baitul tamwil wal mal* perlu juga memberikan saran demi terhindarnya pengelola dari kerugian. Hal ini penting karena menurut persyaratan *mudharabah* bila pembiayaannya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh sipemilik modal. Jika usaha tersebut hanya kembali modal maka modal tersebut sepenuhnya untuk pihak pemodal sedangkan pihak pengusaha tidak mendapatkan bagian.¹⁰⁵

Untuk tidak memberatkan kepada pengelola, maka aqad ditentukan waktunya sesuai dengan kesanggupan dari pengelola. Hal ini dilakukan agar pengelola memiliki perencanaan yang jelas dalam menjalankan usahanya.

¹⁰⁴ Aisah, Sekertaris, Pekanbaru, *wawancara*, 8 Desember 2011.

¹⁰⁵ Warkum Soemitro, *loc.cit.*

Disamping itu, dengan ditentukannya waktu, pengelola tidak lalai dengan menunaikan kewajibannya

Dalam pelaksanaan *mudharabah*, aqad hendaknya tidak ditentukan waktunya, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, bisa saja tahun ini tidak mendapatkan laba, tetapi tahun depan mendapatkan laba.¹⁰⁶ Dilihat dari hal ini, tampaknya tindakan pihak *baitul tamwil wal mal* belum sejalan dengan syarat yang telah ditentukan dalam *mudharabah*.

Meskipun antara pihak *baitul tamwil wal mal* dan pengelola terikat dengan aqad, akan tetapi aqad tersebut tidak mengharuskan pengelola menentukan tempat usaha sesuai dengan keinginan *baitul tamwil wal mal*. Pihak pengelola bebas menentukan tempat usaha sesuai dengan keinginan dan peluang yang dilihatnya prospektif untuk menjalankan usaha.

Disamping tidak menentukan tempat usaha, pihak *baitul tamwil wal mal* juga tidak menentukan bidang usaha pengelola. Pihak pengelola bebas menjalankan bidang usaha ingin dijalankannya tanpa ada paksaan dari pihak *baitul tamwil wal mal* untuk menekuni bidang usaha tertentu.

Dalam sistem *mudharabah*, pihak pemodal tidak boleh menentukan tempat usaha bagi pengelola. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa syarat sahnya *mudharabah* adalah bahwa pelaksanaannya harus bebas. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad tidak mensyaratkan seperti ini.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Anshari Umar, *loc.cit.*

¹⁰⁷ Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *loc.cit.*

Jika pengelola mengalami kerugian dalam usahanya, maka *baitul tamwil wal mal* tidak ikut menanggung kerugian tersebut dalam hal ini pengelola diwajibkan mengembalikan modalnya saja. Apa bila kemacetan disebabkan faktor alam (Kebakaran, Kerusakan dan lainnya), maka *baitul tamwil wal mal* memberikan pinjaman kembali terhadap pengelola apa bila usahanya. Jika tidak, pihak pengelola diwajibkan mencicil modal tersebut dengan tidak memberatkan kepada pengelola.¹⁰⁸

Bila pembiayaan *mudharabah* mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditangun sepenuhnya oleh pemodal, pihak pengelola menanggung kerugian karena tidak, mendapatkan manfaat dari jerih payahnya. Jika usaha tersebut hanya kembali modal, maka modal tersebut sepenuhnya pemilik sipemodal, sedangkan pihak pengelola tidak emndapatkan bagian.¹⁰⁹

Apabila terjadi kerusakan atau kerugian dalam *mudharabah*, maka pengantian kerusakan tersebut haruslah diambil dari keuntungan jika ada, kalau tidak mencukupi baru diambil dari modal. Pihak pengelola tidak diwajibkan mengganti kerusakan atau kerugian ini kecuali hal tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaiannya.¹¹⁰

Dalam sitem *mudharabah*, pengembalian tidak ditentukan waktunya karena laba tidak diketahui kapan waktunya.¹¹¹ Boleh jadi ketika waktu pengembalian sudah sampai, padahal pengelola belum mendapatkan keunutunga atau bahkan sedang mengalami kerugian. Hal ini tentu sanga

¹⁰⁸Yunizel, Manager, wawancara, pekanbaru 5 Desember 2011.

¹⁰⁹Warkum Soemitro, *loc.cit.*

¹¹⁰*Ibid*, h. 89.

¹¹¹Ansari umar, *loc.cit.*

memberatkan pihak pengelola dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pelaksanaan *mudharabah*.

Dalam hal ini pengembalian modal, pihak *baitul tamwil wal mal* tidak menentukan persentasenya. Pengembalian tersebut disesuaikan dengan kesanggupan pengelola dengan tidak merugikan *baitul tamwil wal mal*. Modal dikembalikan sesuai dengan kemampuan pihak pengelola apakah dengan angsuran ataukah dengan tunai. Dalam hal pengembalian modal, peminjam dalam mencicil pinjaman harus tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹¹²

Pertimbangan *baitul tamwil wal mal* terhadap pengelola dalam pengembalian modal apakah secara angsuran atau secara keseluruhan didasarkan atas pertimbangan tertentu. Angsuran dilakukan terhadap pengelola yang melakukan usaha yang pemutaran usahanya cepat, atau keuntungannya cepat seperti pedagang sayur dan lain-lain. Keseluruhan dilakukan terhadap pengelola yang melakukan pemutaran usahanya lambat seperti : pedagang perabot dan lain-lain.¹¹³ Akad pengembalian modal tidak ditentukan *baitul tamwil wal mal* secara sepihak, akan tetapi meminta pertimbangan dari pengelola sehingga tidak terbuka kemungkinan pengembalian modal tersebut memberatkan pengelola atau merugikan pihak pemilik modal. Sampai saat ini nasabah yang menjadi mitra *baitul tamwil wal mal* yang mengadakan *mudharabah* berjumlah 135 orang dengan berbagi bidang usaha. Sebagian besar pengelola menjadi mitra, untuk mendapatkan

¹¹²Warkum Soemitro, *loc.cit*.

¹¹³Yunizel, Manager, wawancara, Pekanbaru 5 Desember 2012.

tambahan modal usaha yakni 95%, sedangkan pengelola yang meminjam untuk membuka usaha sekitar 5%.

Nasabah *baitul tamwil wal mal* memiliki keragaman dalam besarnya modal peminjaman sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Saat ini, nasabah yang meminjam Rp.500.000 sebanyak 25%, Rp.1000.000 sebanyak 40% Rp. 10.000.000 sebanyak 10%. Secara keseluruhan jumlah uang melakukan pembiayaan *mudharib* di *baitul tamwil wal mal* Muhamadiyah Riau berjumlah Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah).¹¹⁴

Dalam hal pengembalian modal dan bagi hasil pihak *baitul tamwil wal mal* menawarkan beberapa cara pengembalian modal yaitu : *pertama* , pembagian modal dan bagi hasil secara angsuran (modal dan bagi hasil dibayar secara bersamaan), pada waktu yang telah ditentukan modal dan bagi hasil lunas, tergantung dengan perjanjian. *Kedua*, pengembalian modal secara langsung yaitu pada waktu yang telah ditentukan pihak pengelola harus membayar lunas modal tersebut, sedangkan pengembalian bagi hasil di bayar dibayar secara angsuran (modal dan bagi hasil tidak dibayar secara bersamaan).¹¹⁵ sebagai contoh dapat dilihat dari hasil wawancara pada tanggal 3 Februari 2012 dengan bapak Andi, dimana bapak andi meminjam dana kepada *baitul tamwil wal mal* pada tanggal 20 Mei 2010, beliau adalah seorang pedangang bawang yang butuh tambahan modal. Pinjaman bapak Andi sebanyak Rp.500.000, dalam jangka waktu lima bulan (20 Minggu), untuk setiap minggu nya bapak Andi harus membayar kepada *baitul tamwil*

¹¹⁴Yunizel, Manager, wawancara, Pekanbaru 5 Desember 2012

wal sebanyak Rp.35.000, dengan ketentuan Rp. 25.000 bayaran pokok (modal dari *baitul tamwil wal mal*) dan Rp. 10.000 untuk bagi hasil.¹¹⁶

Jadi dalam pelaksanaan pengembalian modal dan bagi hasil pihak pemberi dua kemungkinan, hal ini tidak terlepas dari kesepakatan bersama antara pengelola dan pemilik modal. Jika terjadi penunggakan pembayaran maka dalam konsep konvensional akan dikenakan penalty dengan bunga berbunga. Hal ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi Islam, BTM Muhamadiyah Riau hanya akan memberikan teguran atau surat peringatan kepada nasabah yang belum melunasi hutangnya sampai jatuh tempo pembayaran, bahkan jika alasan keterlambatan dapat diterima dan ditolerir, BTM Muhamadiyah Riau memberikan suatu kebijakan yang amat menguntungkan kepada nasabah berupa penambahan jangka waktu pembayaran tanpa dikenai biaya sedikit pun,

Resiko ada BTM Muhamadiyah Riau jika kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya walaupun telah diberikan penambahan waktu, BTM Muhamadiyah Riau menetapkan adanya jaminan terhadap pembiayaan Mudharabah ini yang tercantum dan tertera pada aqad atau perjanjian Mudharabah, yang hanya sekedar upaya untuk melihat keseriusan dan lebih mengikat dan meningkatkan si nasabah agar selalu serius dan berhati-hati dalam menjalankan usahanya dalam rangka menyelamatkan dana-dana titian pihak ketiga pada BTM, walau pun tidak sepenuhnya mutlak dilakukan.

¹¹⁶ Andi, Pengelola, wawancara, Pasar Pagi Arengka 10 Desember 2011.

Misi didirikannya BTM Muhamadiyah Riau adalah meningkatkan taraf hidup pedagang kecil dan juga berupaya untuk dan juga untuk meminimalisir pedagang tersebut dari jeratan rentenir. Dari keterangan tersebut maka terungkaplah bahwa betapa mulia tujuan didirikannya lembaga tersebut. Dan salah satu cara untuk merealisasikan misi tersebut, *mudharabah* adalah salah satu cara yang dirasa cukup tepat dan bisa mengupayakan nasabah terhindar dari kejamnya bahaya bunga dan riba

Keberadaan *mudharabah* sangat lah disambut oleh para pedagan kecil disekitarpasar pagi Arengka, Nasabah memilih BTM Muhamadiyah Riau dikarenakan, prosedur yang tidak bertele-tele, dan nasabah bisa membayar angsuran tanpa ditetapkan jangka waktu nya oleh pihak BTM Muhamadiyah Riau, dan alasan mereka ikut pembiayaan *mudharabah* karena lebih aman dan tidak memberatkan, tidak seperti bank keliling atau rentenir yang menetapkan sitem bunga dan bunga nya cukup besar sehingga mereka merasa amat keberatan dan terbebani, maka mereka memilih pembiayaan *mudharabah* dan BTM Muhamadiyah Riau sebagai wadah untuk melakukan pembiayaan agar usaha mereka tetap berjalan dan merasa tidak terbebani oleh angsuran yang harus dibayar.

Selain dari pada itu akibat menggunakan produk *mudharabah* juga memberikan keuntungan dari sisi rohani para nasabah, karena menurut mereka dengan melakukan pembiayaan di BTM Muhamadiyah Riau mendapatkan pahala, karena terjalin nya tali silaturahmi *serta ukhuwah islamiyah* , karena sering melakujuan pertemuan-pertemuan untuk melakukan

pembinaan mengenai usaha agar berjalan lancar dan tidak keluar dari norma-norma Islami. Oleh karena itu BTM selalu berupaya untuk mengontrol setiap kegiatan para nasabah-nasabahnya agar tidak terjerumus kedalam lembah hitam, yaitu transaksi-transaksi yang dilarang oleh al-Qur'an dan Hadist.

Setiap keterlambatan lebih dari 2(dua) hari (tidak termasuk hari Minggu/ hari besar) dari tanggal jatuh tempo yakni setiap minggu, maka debitur akan dikenai denda berupa biaya penagihan sebesar 5% dari jumlah tunggakan untuk setiap kali penagihan.¹¹⁷

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aqad Mudharabah pada *Baitul Tamwil Wal Mal Muhamadiyah Riau*.

Bentuk transaksi dengan modal awal ditentukan oleh pemilik modal dan ditanda tangani atas persetujuan kedua belah pihak. Bentuk ini adalah *mudharabah muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shohibul mal* dan *mudharib* yang dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Menurut Ahmad Azhari Basyiri, Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian secara jelas tentang adanya ijab dan qabul. Dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan ijab dan qabul. Dan begitu juga halnya yang terjadi di BTM Muhamadiyah Riau, aqad dilakukan dengan cara lisan dan tertuang dalam kontrak yang tertulis.

¹¹⁷Yunizel, Manager, *wawancara*, 5 Desember 2011

C. Tinjauan Atau analisa Fiqih Muamalah / Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil pada *Baitul Tamwil Wal Mal Muhamadiyah Riau*.

Pada dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadist memiliki kemaslahatan bagi umatnya jika ajaran tersebut dilaksanakan secara benar sesuai dengan tuntutan hakiki dari ajaran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat : 48 sebagai berikut

Artinya :”... untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang”¹¹⁸

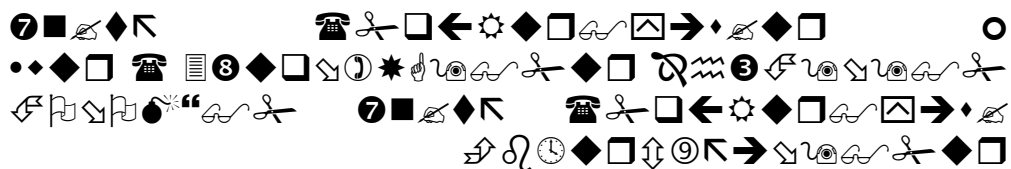
Demikian juga halnya dengan *mudharabah*, jika ia dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan makna hakiki yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan hadist, maka kemaslahatan yang diinginkan akan tercapai dengan baik. Berkenanaan dengan hal ini dapat dilihat firman Allah dalam al-Qur'an ada surat al-Muzammil ayat : 20 sebagai berikut..

Artinya :“.....dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”.¹¹⁹

¹¹⁸Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra. 1989), cet ke 10, h. 168.

¹¹⁹Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (al-Huda : Gema Insani, 2002). cet ke 5, h. 576.

Argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan sesuatu usaha.¹²⁰ Berdasarkan data pelaksanaan *mudharabah* pada *baitul tamwil wal mal* Muhamadiyah riau serta pandangan anggota terhadap pelaksanaanya, maka keberadaan BTM Muhamadiyah Riau sangat patut di pertahankan dan dikembangkan. Hal ini sesuai dengan anjuran al-Quran untuk selalu bekerja sama dalam hal kebaikan sebagai mana firmanNya dalam surah al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :



Artinta : ‘ *bertolong-tolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa dan jangan kalian bertolong dalam kejahatan dan dosa*’¹²¹.

Namun demikian ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali agar pelaksanaannya tidak keluar dari yang telah ditetapkan Syar’i. Poin yang dimaksud adalah adanya persyaratan berupa jaminan (surat berharga/ barang), penentuan waktu laba dan aqad, penanggung jawab kerugian, penentuan waktu dalam penegembalian modal

Berkenaan dengan adanya jaminan untuk mendapatkan modal sepeti yang diisyatkan oleh pihak BTM Muhamadiyah Riau kepada pihak pengelola, hal ini tidak dijumpai dalam pola pelaksanaan *mudharabah* dalam Islam. Pemberian modal dengan jaminan pada dasarnya sudah keluar dari

¹²⁰Muhamad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta Gema Insani, , 2001), cet ke 3, h. 95.

¹²¹Departemen Agama, *op.cit.*, h. 157.

prinsip dan persyaratan pelaksanaan *mudharabah*. Tujuan *mudharabah* adalah untuk menggabungkan masing masing potensi, yakni pemilik modal yang tidak memiliki keahlian usaha dengan pengelola yang tidak mempunyai modal untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan¹²². Hal ini sejalan dengan terminologi *al-Mudharabah* itu sendiri yakni kontrak dimana harta tertentu atau stok diberikan oleh pemilik kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keberuntungan, kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta, dalam praktek *mudharabah* dengan menggunakan jaminan dengan demikian, dalam aspek ini pelaksanaan *mudharabah* di *baitul tamwil wal mal* Muhamadiyah Riau tampak nya belum sesuai dengan prinsip yang ditetapkan syar'i.

Mengenai penentuan waktu laba oleh pihak BTM Muhamadiyah Riau dalam aqad, hal ini tidak ditemukan dalam persyaratan *mudharabah*. Bahkan sebaliknya, aqad hendaknya ditentukan berapa lamanya, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya. Seorang pengusaha kadang-kadang belum berlaba hari ini, akan tetapi mungkin baru memperoleh laba beberapa hari kemudian¹²³.

Mengenai denda Setiap keterlambatan lebih dari 2(dua) hari (tidak termasuk hari Minggu/ hari besar) dari tanggal jatuh tempo yakni setiap minggu, maka debitur akan dikenai denda berupa biaya penagihan sebesar

¹²²Warkum Soemitro. *op.cit.*, h. 86.

¹²³Ar Rahman, *Syariah III Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), cet ke 2, h 37.

5% dari jumlah tunggakan untuk setiap kali penagihan. Dan ini tidak sesuai dengan syariat Islam atau pun ketentuan-ketentuan dalam *mudharabah* itu sendiri

Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh pihak BTM Muhamaduyah riau ini tampaknya belum sesuai dengan konsep Islam tentang *mudharabah*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan adanya jaminan untuk mendapatkan modal seperti yang diisyaratkan oleh pihak BTM Muhamadiyah Riau kepada pihak pengelola, hal ini tidak dijumpai dalam pola pelaksanaan *mudharabah* dalam Islam. Pemberian modal dengan jaminan pada dasarnya sudah keluar dari prinsip dan persyaratan pelaksanaan *mudharabah*. Tujuan *mudharabah* adalah untuk menggabungkan masing masing potensi, yakni pemilik modal yang tidak memiliki keahlian usaha dengan pengelola yang tidak mempunyai modal untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan.
2. Mengenai denda Setiap keterlambatan lebih dari 2(dua) hari (tidak termasuk hari minggu/ hari besar) dari tanggal jatuh tempo yakni setiap minggu, maka debitur akan dikenai denda berupa biaya penagihan sebesar 5% dari jumlah tunggakan untuk setiap kali penagihan. Dan ini tidak sesuai dengan syariat islam atau pun ketentuan-ketentuan dalam *mudharabah* itu sendiri
3. dalam aspek ini pelaksanaan *mudharabah* di *baitul tamwil wal mal* Muhamadiyah Riau tampak nya belum sesuai dengan prinsip yang ditetapkan syar'i.

B. Saran

1. Kalau kita ingin terhindar dari riba maka tinggalkanlah praktek-praktek riba, dan beralihlah kepada jenis-jenis transaksi yang dibenarkan syariat Islam.
2. Diharapkan kepada pihak yang melaksanakan konsep *mudharabah* supaya menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati, sehingga diantara keduanya tidak merasa dirugikan.
3. Diharapkan kepada pihak yang *bermudharabah*, hendaknya mengetahui ketentuan dan syarat yang telah dijelaskan dalam syariat Islam.
4. Kepada pemuka masyarakat dan ahli hukum Islam agar tetap berpegang pada kebenaran yang pasti berdasarkan kepada nash, atau disepakati oleh Ijma, salah satu termasuk disini dalam bidang muamalah, seperti bagi hasil atau kerjasama.
5. Untuk tidak melakukan praktek riba karena sangat membeban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Bukhari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung : Alfabeta 1992,)
- Al-Mahli Jalaludin, *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*, (Surabaya: Syirkah Nur Asia, 2004), cet ke 4,
- Antonio, Syafi’I, Muhamad, *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press 2001)
- Arisson Hendry dkk, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, (Jakarta : Muamalat Institute, 1999) cet. 1.
- Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy Syifa. 1992)
- Dewan, Syari’ah Nasioanal, *Fatwa DSN*, (Jakarta : MUI, 2000.)
- Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara 2008)
- Karim, Adi warman, Ir, SE, MBA. MAEP, *Bank Islam Analisa fiqih dan Keuangan*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2003)
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Kasmir, SE., MM, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Muhamad al-‘Allamah Syaikh bin ad-Dimasyqi Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung, 2012). Cet ke 13.
- Muhamad, Abu Bakar, Terj. *Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ihklas 1995)
- Muslehuddin Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet ke 3.
- Pasaribu Hairuman, Suhwrdi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet ke 1

- PINBUK, Jakarta: PINBUK *Pedoman Cara Pembentukan BTM*,
- PKES, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: PKES 2006)
- Az-Zuhaili, Wahabah, Prof. DR.. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet, I h.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)
- Rahman, Ar. *Syariah III Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), cet ke 2,
- Rusdy, Ibnu, Terj, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV Asy Syafa 1990)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Terj, Kamaludin A. Marzuki, (Bandung PT. Al-Ma'arif, 1996) Jilid 13
- Soemitro, warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997) Cet. II,
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar algensindo. 1994) cet ke 27.
- Suhendi, Hendi, Dr, *Fiqih Muamalah* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Suhrawadi, Pasaribu, Hairuman, Lubis,k, *Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Syafe'I, Rachmat, *piqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) Cet. I
- Thahrir Abdul Muhsin Sulaiman, *Ilaaju al-Muskilah Iqlis Hasdiyah*, Terj : Ashari Umar Sitingal, *Menangulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1985)
- Umar Ashari, *Fiqih Wanita*, (Semarang: As-Syifa' 1994)
- Yahya, Mukhtar, dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986)
- Zuhri, Muhamad, *Riba dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997)

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Bukhari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung : Alfabeta 1992,)
- Al-Mahli Jalaludin, *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*, (Surabaya: Syirkah Nur Asia, 2004), cet ke 4,
- Antonio, Syafi'I, Muhamad, *Bank Syariah dari Teori ke praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press 2001)
- Arisson Hendry dkk, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, (Jakarta : Muamalat Institute, 1999) cet. 1.
- Ash-Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy Syifa. 1992)
- Dewan, Syari'ah Nasioanal, *Fatwa DSN*, (Jakarta : MUI, 2000.)
- Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara 2008)
- Karim, Adi warman, Ir, SE, MBA. MAEP, *Bank Islam Analisa fiqih dan Keuangan*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2003)
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Kasmir, SE., MM, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Muhamad al-'Allamah Syaikh bin ad-Dimasyqi Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung, 2012). Cet ke 13.
- Muhamad, Abu Bakar, Terj. *Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ihklas 1995)
- Muslehuddin Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet ke 3.
- Pasaribu Hairuman, Suhwrdi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet ke 1
- PINBUK, Jakarta: PINBUK *Pedoman Cara Pembentukan BTM*,

PKES, *Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: PKES 2006)

Az-Zuhaili, Wahabah, Prof. DR.. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid V*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet, I h.

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997)

Rahman, Ar. *Syariah III Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), cet ke 2,

Rusdy, Ibnu, Terj, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV Asy Syafa 1990)

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Terj, Kamaludin A. Marzuki, (Bandung PT. Al-Ma'arif, 1996) Jilid 13

Soemitro, warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997) Cet. II,

Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar algensindo. 1994) cet ke 27.

Suhendi, Hendi, Dr, *Fiqih Muamalah* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Suhrawadi, Pasaribu, Hairuman, Lubis,k, *Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Syafe'I, Rachmat, *piqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) Cet. I

Thahrir Abdul Muhsin Sulaiman, *Ilaaju al-Muskilah Iqlis Hasdiyah*, Terj : Ashari Umar Sitingal, *Menangulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1985)

Umar Ashari, *Fiqih Wanita*, (Semarang: As-Syifa' 1994)

Yahya, Mukhtar, dkk, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986)

Zuhri, Muhamad, *Riba dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997)